

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Perluas Cakupan Penerima Bansos

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah memperluas cakupan penerima bantuan sosial (bansos) saat diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Dia mendesak agar pemerintah minimal memberlakukan kembali skema bansos pada awal pandemi Covid-19 pada 2020, mencakup perluasan target dan peningkatan indeks bansos PKH, Sembako, dan Bansos Tunai.

"Tentunya dengan validasi data warga yang berhak, serta pengawasan dan transparansi yang lebih baik, agar tak terulang tragedi korupsi bansos, yang menyebabkan program bansos jadi tidak efektif," kata Hidayat kepada wartawan Minggu (4/7).

Hidayat juga mengingatkan peran sentral Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menyelesaikan bantuan sosial di era PPKM Darurat dengan skema yang lebih tepat guna. Dia menyarankan pemerintah agar PPKM Darurat menjadi kebijakan solutif sehingga harus bisa membantu masyarakat terdampak kebijakan PPKM dengan menyalurkan perluasan bansos.

Hidayat menjelaskan, pada awal Pandemi khususnya periode April-Juni 2020, pemerintah melalui Kementerian Sosial memberlakukan perpanjangan bantuan sosial pada beberapa program.

Dia mencontohkan bansos Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga

Penerima Manfaat indeks bantuannya dinaikkan sebesar 25 persen dan pencairannya yang tadinya tiga bulan sekali dipercepat menjadi bulanan.

Selain itu, menurut Hidayat, kartu sembako diberikan kepada 20 juta KPM dengan indeks bantuan ditingkatkan 33 persen sehingga per-orang mendapatkan Rp200.000 per-bulan untuk sembako.

Menurutnya, melalui mekanisme perluasan bansos seperti awal pandemi tersebut, Pemerintah baru bisa secara lebih efektif meminta masyarakat untuk tinggal di rumah, dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

"Tidak hanya kepada masyarakat miskin, namun juga masyarakat rentan. Bansosnya pun jangan hanya bansos reguler, namun mestinya juga bansos yang diperluas, dengan data yang lebih valid, dan dengan komitmen profesionalitas yang lebih tinggi sehingga tidak dikorupsi lagi," katanya.

Sebelumnya diberitakan pemerintah akan kembali menyalurkan bansos di masa PPKM darurat kepada masyarakat miskin yang terdampak karena tak bisa bekerja di tengah pembatasan sosial. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang akan disalurkan adalah sebesar Rp 300.000 tiap bulannya dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan.

Sedangkan, untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000.

"Warga akan menerima Rp 600.000 sekaligus," ujar Mengans Risma dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7) lalu. ● **mei**

Tepat, Pemerintah Tetapkan HET Obat untuk Penanganan Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengapresiasi keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) obat penanganan Covid-19.

Menurut Charles, ditetapkan HET oleh Kemenkes merupakan langkah satu bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dalam bentuk ketersediaan obat-obatan yang terjangkau.

"Kepmenkes tersebut akan menjamin stabilitas, kepastian, dan keterjangkauan harga agar tidak ada kenaikan harga yang berlebihan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (4/7).

Menurut Charles, Kepmenkes ini dapat menghindari potensi adanya spekulasi keuntungan di tengah kondisi darurat Covid-19. Charles mengungkapkan, harga sejumlah obat penanganan Covid-19 ini sempat melonjak di pasaran.

"Misalnya saja Favipiravir atau lebih dikenal dengan nama Avigan, ada yang menjual hingga Rp 125.000/tablet di e-commerce. Pada

hal sesuai Kepmenkes, HET obat antivirus ini hanya Rp 22.500/tablet," tuturnya.

Charles menegaskan, di tengah pandemi ini, semua pihak seharusnya memupuk rasa empati terhadap sesama, terutama kepada mereka yang tengah berjuang melawan Covid-19. Dengan begitu, tidak ada lagi tindakan ambil untung di tengah penderitaan warga.

"Marilah kita berempati sambil terus bergotong-royong dengan ikut vaksinasi dan menerapkan prokes agar pandemi dan masa-masa sulit ini segera berakhir," ujar Charles.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menandatangani Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam keputusan itu, ada 11 yang obat yang ditetapkan harga eceran tertingginya dalam masa pandemi Covid-19. Di antaranya adalah Favipiravir 200 mg, Remdesivir 100 mg, dan Oseltamivir 75 mg. ● **han**

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Larang WNA Masuk Indonesia

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang telah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Namun, Dasco meminta pemerintah juga menutup pintu untuk warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia.

"PPKM Darurat ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran virus yang kian mengkhawatirkan di setiap harinya," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Minggu (4/7).

Dasco mengatakan efektivitas PPKM Darurat penting untuk diutamakan. Karena itulah dia meminta pemerintah melarang WNA masuk Indonesia, baik dengan alasan bekerja maupun wisata.

"Efektivitas dari kebijakan ini penting untuk diperhatikan, supaya pemberlakuannya hanya sekali saja dan tidak berdampak negatif yang cukup dalam terhadap berbagai sektor. Oleh karenanya, selama pemberlakuan PPKM Darurat saya meminta kepada Pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, dengan alasan berwisata maupun bekerja," tutur Koordinator Satgas Lawan Covid-19 dan PEN

DPR RI itu.

Di samping alasan efektivitas, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengingatkan tentang keselamatan masyarakat. Selain itu, sebagai langkah antisipasi bertumbuhnya varian virus baru yang masuk ke Indonesia.

"Saya pikir, kita semua bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka langkah tegas ini perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan juga langkah antisipasi masuknya varian virus baru dari luar negeri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dasco pun berharap masyarakat tidak lelah dalam melawan Covid-19. Dia juga mewanti-wanti masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi aktivitas di luar rumah selama PPKM Darurat.

"Kita semua tentu sudah lelah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta beraktivitas di rumah saja, namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, mohon untuk tidak kendor. Mari kita bangun kesadaran bersama untuk melawan virus ini dengan tetap menerapkan prokes yang ketat dan menaati kebijakan pemerintah selama PPKM Darurat ini berjalan," tandasnya. ● **han**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



UPAYA PEMERINTAH MEKENAN LAJU KASUS POSITIF COVID-19

Sebuah garis batas aman melintas terpasang di lorong ruangan Rusunawa Pringapus yang menjadi tempat isolasi warga positif COVID-19 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/7). Selain melaksanakan PPKM Darurat Jawa-Bali, pemerintah juga menggenjatkan program vaksinasi massal sebagai upaya menekan laju kasus positif COVID-19.

Soal *The King of Lip Service*, Dinilai Sadis, Pengamat: tapi Kalau Biasa-biasa Saja ...

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah tidak alergi dengan kritik. Namun, ia mempertanyakan maksud BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi "The King of Lip Service".

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebut Presiden Jokowi sebagai "The King of Lip Service" memang berlebihan.

Namun, menurut Adi, jika narasi yang disampaikan biasa-biasa aja, maka tidak akan didengarkan publik.

"Itu cukup sadis. Memang berlebihan. Tapi dalam logika aktivis dan demo itu biasa. Artinya supaya pesan politik yang disampaikan teman-teman BEM dan aktivis sampai kepada publik. Kalau narasi politik yang disampaikan biasa-biasa saja dan banyak sopannya, tentu tidak akan didengar publik," kata Adi dalam diskusi daring Cross Check From Home, Minggu (4/7).

Selain itu, dia menambahkan, kritik tak harus disertai dengan solusi. Menurut Adi, jika pengkritik harus selalu dituntut solusi, maka tidak akan pernah ada kritik. Apalagi, kata Adi, selama ini solusi yang disampaikan publik pun tidak

didengarkan pemerintah.

"Kan itu pernyataan teman-teman BEM. Sering mengkritik dan memberikan solusi, misal tentang KPK, ada pelemahan. Lalu UU ITE hati-hati karena bisa dijadikan alat untuk membungkam kelompok aktivis. Kan begitu klaim mereka, tapi tidak didengar," tuturnya.

Presiden sendiri telah merespons polemik kritik dari BEM Universitas Indonesia yang menyebutnya sebagai "The King of Lip Service". Menurutnya, kritik merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Presiden juga mengingatkan agar universitas tidak perlu menghalangi ekspresi mahasiswa.

"Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi dalam rekaman keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6) lalu.

Kendati demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

"Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tetapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19," ucapnya.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah tidak alergi dengan kritik. Namun, Ngabalin masih mempertanyakan maksud pernyataan BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi "The King of Lip Service".

"Kalau kritik tidak ada masalah. Tapi kalau nyinyir, menyebut 'The King of Lip Service' apa artinya? Keluar dari mulut mahasiswa, tokoh-tokoh muda masyarakat intelektual yang kita harapkan 5-10 tahun mendatang mereka memegang tampuk kepemimpinan ini," ujar Ngabalin.

Menurutnya, kritik juga harus disertai dengan solusi. Ngabalin mengatakan, jika BEM UI mengkritik cara kerja pemerintah, maka harus bisa menunjukkan cara yang benar. "Kalau mengkritik misal satu kebijakan yang dilakukan pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh seperti begini caranya kerja yang benar. Kritik kan begitu," ujarnya.

Selain itu, Ngabalin menambahkan, KSP memiliki suatu wadah bernama "KSP Mendengar" yang digagas Ke-

pala Staf Presiden Moeldoko. Dia mengatakan, publik bisa menyampaikan kritik dan saran lewat wadah itu.

"Di tempat itu, kalau teman-teman misal melihat ada

yang tidak beres atau tidak bagus, di sana teman-teman mengungkapkan ekspresi itu. Atau juga kepingin jumpa dengan presidennya, saya bisa atur itu," katanya. ● **han**

Voxpol Center: Prabowo Unggul Saat Dijadikan Capres pada Simulasi Pilpres

JAKARTA (IM) - Hasil survei dari lembaga survei Voxpol Center mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dalam sejumlah simulasi calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangsi Syarwi Chaniago mengatakan, ada tiga simulasi yang dijabarkan lembaga survei terkait capres 2024. Pertama, untuk simulasi capres dengan menyodorkan 11 nama calon, Prabowo meraih posisi teratas dengan persentase 20,3 persen.

"Simulasi capres ada 11 nama, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapa capres yang akan ibu/bapak, saudara pilih. Lalu 20,3 persen adalah Pak Prabowo Subianto," kata Pangsi dalam rilis survei yang digelar secara virtual, Sabtu (3/7).

Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan persentase 20 persen. Posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 16,8 persen. Posisi keempat ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan 8,5 persen, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posisi lima dengan 6,2 persen.

"Lalu Agus Harimurti Yudhoyono 5,7 persen. Puan Maharani 5,1 persen. Di bawah itu, di bawah angka 3 persen seperti Risma 2,6 persen, Erick Thohir 2,5 persen, Khofifah 1,7 persen, dan Airlangga Hartarto 0,8 persen," ucap Pangsi.

Prabowo juga masih menempati empati posisi teratas ketika survei dilakukan simulasi dengan 6 nama tokoh capres di antaranya Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, AHY, dan Puan Maharani. Prabowo memiliki persentase 23 persen, berada di atas Ganjar Pranowo yang mencapai 22,7 persen. Kemudian, posisi ketiga ada Anies Baswedan dengan 19,8 persen. Ridwan Kamil berada di peringkat empat dengan persentase 8,7 persen.

"Kemudian AHY 6,2 persen, dan Puan Maharani 6 persen," tutur Pangsi. Untuk simulasi capres dengan menyodorkan 4 nama, hasil survei juga menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati peringkat teratas.

Prabowo memiliki persentase 30,1 persen di antara tiga tokoh lain yang disodorkan yaitu Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani. Posisi kedua dari simulasi empat capres tersebut diisi oleh Anies Baswedan dengan persentase 24 persen. Kemudian Sandiaga Uno 16,7 persen dan Puan Maharani 10 persen.

Dengan Pasangan

Selain itu, Voxpol Center juga menggelar enam simulasi Pilpres jika diikuti hanya tiga pasangan calon (paslon) dan jika digelar saat survei. Simulasi ini melibatkan beberapa nama. Simulasi pertama, Pilpres diikuti paslon Prabowo-Puan Maharani, Anies Baswedan-AHY, dan Ridwan Kamil-Sandiaga Uno. "Kalau tiga pasang, ini Prabowo-Puan 26,5 persen.

Anies-AHY 24,2 persen, dan RK-Sandi 21,8 persen. Kalau ini tiga pasang calon dengan simulasi pertama," kata Syarwi.

Kemudian pada simulasi kedua, Pilpres diikuti paslon Ganjar Pranowo-Erick Thohir, Puan-Anies, dan AHY-Muhammad Iskandar. Hasilnya adalah Ganjar-Erick teratas dengan 32,6 persen. Lalu, Puan-Anies 24,8 persen dan AHY-Muhammad 10,8 persen.

Pada simulasi yang ketiga, Pilpres diikuti oleh AHY-RK, Puan-Anies, dan Airlangga Hartarto-Sandiaga Uno. Hasil survei pun kemudian menempatkan AHY-RK pada posisi teratas dengan 22,9 persen. Disusul oleh Puan-Anies 21,2 persen, dan Airlangga-Sandi 20,8 persen.

"Kalau tidak kita pasangkan Prabowo, ini akan agak berimbang ya persentasenya. Tanpa kita masukkan pula Ganjar. Mereka tidak kita masukkan dalam simulasi ini, maka yang terjadi demikian," ujarnya.

Kemudian, simulasi keempat nama Prabowo, Ganjar, dan Anies kembali dimasukkan dalam simulasi Pilpres. Hasilnya, Prabowo kembali berada di urutan atas dengan dipasangkan Sandiaga Uno. Persentase paslon itu mencapai 34 persen.

"Lalu Anies-AHY 23,7 persen. Ganjar-Airlangga 19 persen," ungkapnya.

Selanjutnya, pada simulasi kelima, Pilpres diikuti Ganjar-Anies, AHY-Sandi, dan RK-Airlangga. Hasilnya yaitu Ganjar-Anies menempati persentase tertinggi yaitu 41,4 persen. Sementara AHY-Sandi 24,4 persen, dan RK-Airlangga 11,3 persen.

"Jadi Ganjar-Anies unggul di simulasi 5," ucapnya.

Terakhir, pada simulasi Pilpres yang keenam, diikuti oleh Prabowo-Anies, Ganjar-RK, dan AHY-Khofifah. Hasilnya menempatkan Prabowo-Anies unggul dengan persentase 38,8 persen. Sementara Ganjar-RK 29,8 persen, dan AHY-Khofifah 6,1 persen.

Berdasarkan enam simulasi tersebut, Pangsi menyimpulkan bahwa Prabowo masih unggul sebagai capres meski ia dipasangkan dengan siapapun tokohnya.

"Maka jika Pilpres dilakukan saat survei dengan simulasi 6 kandidat Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo 23 persen, Ganjar 22,7 persen, dan Anies 19,8 persen. Masih unggul bila dibandingkan dengan kandidat yang lain," tuturnya.

Adapun survei tersebut dilakukan selama 10 hari dari 22 Juni hingga 1 Juli 2021 dengan menggunakan metode wawancara melalui telepon. Survei memanfaatkan data base 32.000 nomor handphone yang dimiliki Voxpol Center dan dibentuk dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terdapat 1.200 responden dengan proporsi 50:50 antara laki-laki dan perempuan. ● **han**



BANTUAN SEMBAKO KORBAN BANJIR SUNGAI WANGGU

Beberapa pengurus karang taruna mengangkat sembako bantuan dari partai politik di Kelurahan Lepolepo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (3/7). Sejumlah Partai Politik memberikan bantuan paket sembako dan barang kebutuhan sehari-hari untuk warga yang terdampak banjir luapan Sungai Wanggu.